

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2018, November 23). *Mengenal Tairf PPN 1%*. Retrieved Mei 16, 2022, from <https://www.online-pajak.com/>: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ppn-1-persen>
- Admin. (2021, Februari 22). *INILAH 5 PERUSAHAAN EKSPEDISI TRUK TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2021*. Retrieved Mei 16, 2022, from Flits.id: <https://flits.id/inilah-5-perusahaan-ekspedisi-truk-terbaik-di-indonesia-tahun-2021/>
- Admin. (n.d.). *CARA LAPOR PPN BULANAN*. Retrieved Mei 16, 2022, from <https://pajaknesia.id/>: <https://pajaknesia.id/cara-lapor-ppn-bulanan/#:~:text=Cara%20Pelaporan%20SPT%20Masa%20PPN&text=Akses%20link%20https%3A%2F%2Fweb,SPT%20lalu%20klik%20posting%20SPT>
- Alawiyah, I. T., Santoso, H., & Damayanti, W. (2021). Perceived Risk Dalam Transaksi e-commerce Perspektif Etika Bisnis Islam dan Social Culture. *Volume 08, Nomor 01, April 2021*, 228-229.
- Asmarani, N. G. (2020, Juli 1). *Apa Itu Pemusatan Tempat PPN Terutang?* Retrieved Mei 16, 2022, from news.ddtc: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pemusatan-tempat-ppn-terutang-22020>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36/2008 . Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak . Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2020 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2021 Tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Fitriya. (2022, April 5). *Update eFaktur 3.2 PPN 11% dan Perubahan di e-Faktur Terbaru*. Retrieved Mei 17, 2022, from <https://klikpajak.id/blog/>: 1. Ubah nama atau rename folder e-Faktur lama (e-Faktur 3.1 yang sebelumnya diunduh). 2. Agar memudahkan menemukan folder eFaktur lama, Anda dapat rename dengan menambahkan kata “-old” pada folder tersebut. 3. Unduh patch update aplikasi eFaktur 3.2 dan e

Izzah, N. (2018). Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket PT. Pos Indonesia Makassar. 1-3.

Karniawan, N., & Syahzuni, B. A. (2022). Penerapan pajak pertambahan nilai berdasarkan PMK No.121/PMK.003/2015 atas transaksi ekspor impor pada perusahaan freight forwarding. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2022-2032.

Muljono. (2015). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Republik Indonesia. (1994). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Profil Perusahaan. (n.d.). Retrieved Mei 17, 2022, from <https://indahonline.com/:https://indahonline.com/company/about/profile>

Publik, P. (2020, Januari 2020). *Ini Dia 10 Jasa Pengiriman Terpopuler di Indonesia*. Retrieved Mei 16, 2022, from [PelayananPublik.id:https://pelayananpublik.id/2020/01/17/ini-dia-10-jasa-pengiriman-terpopuler-di-indonesia/](https://pelayananpublik.id:https://pelayananpublik.id/2020/01/17/ini-dia-10-jasa-pengiriman-terpopuler-di-indonesia/)

Rafinska, K. (2018, November 26). *PPN Atas Jasa Pengiriman Barang*. Retrieved Mei 16, 2022, from <https://www.online-pajak.com/:https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ppn-atas-jasa-pengiriman-barang>

Rusdhi, M. (2016). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Setya, T. R. (2021). *Profil JNE*. Retrieved from [Merdeka:https://m.merdeka.com/jne/profil/](https://m.merdeka.com/jne/profil/)

Sultan, R. (2021, September 14). *Pengiriman JNE masih konsisten tumbuh 30% tahun ini*. Retrieved Mei 16, 2022, from <https://www.kontan.co.id/>

<https://industri.kontan.co.id/news/pengiriman-jne-masih-konsisten-tumbuh-30-tahun-ini>

Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Sentra Indologis Utama Manado. *Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 977-985, 977-985.*

ZF. (2021, Juli 1). *7 Karakteristik Utama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).* Retrieved Mei 16, 2022, from flazztax: <https://flazztax.com/2021/07/01/7-karakteristik-utama-dari-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>